



**TANGGAPAN, MASUKAN, DAN PERTANYAAN  
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA DPR RI  
DALAM RAPAT KERJA KOMISI IV DPR RI DENGAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI  
SENIN, 23 AGUSTUS 2021**

-----

- Pembahasan : 1. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA. 2020;  
2. Evaluasi Anggaran Tahun 2021;  
3. RKA K/L Tahun 2022 (hasil pembahasan disampaikan secara tertulis kepada Badan Anggaran untuk disinkronisasi)  
5. Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi; dan  
4. Isu-isu aktual lainnya.**

**Disampaikan oleh : Ir. H. T.A. KHALID, M.M.**

**No Anggota : A-60**

*Assalamualaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,*

*Salam sejahtera untuk kita semua,*

*Shalom*

*Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan,*

*Salam Indonesia Raya*

Yang Terhormat,

- 1. Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI;**
- 2. Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan RI, beserta seluruh Pejabat Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.**

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dan dapat menjalankan aktifitas sehari-hari dengan baik. Amin ya rabbal alamin.

Sehubungan dengan pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN Tahun Anggaran 2020; Evaluasi Anggaran Tahun 2021; RKA K/L Tahun 2022 (hasil pembahasan disampaikan secara tertulis kepada Badan Anggaran untuk disinkronisasi); Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi; dan isu-isu aktual lainnya Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, kami Fraksi Partai Gerindra DPR RI menyampaikan beberapa catatan, tanggapan, masukan dan pertanyaan sebagai berikut;

1. Terkait dengan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN Tahun Anggaran 2020, KKP mendapatkan opini BPK **Wajar Dengan Pengecualian (WDP)**. Kami Fraksi Partai Gerindra menilai dan mengharapkan kepada Menteri KKP agar segera menggenjot sekuat tenaga realisasi ril anggaran berupa program program strategis KKP kepada nelayan, pembudidaya ikan, petani garam, UMKM Sektor KP, dan masyarakat pesisir agar terberdayakan secara signifikan, sehingga KKP mendapatkan **WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)** pada tahun 2021 ini.
2. Masih terkait opini BPK yaitu WDP kepada KKP tahun 2020, hemat kami KKP dapat membantu nelayan, pembudidaya ikan, tambak, petani garam, UMKM sektor KP melalui jalur KUR yang bisa menyentuh langsung untuk membangkitkan ekonomi masyarakat KP. Oleh karena itu kami Fraksi Gerindra meminta kepada Menteri KP untuk melaporkan progress realisasi pengucuran KUR di LPMUKP tahun 2021, Untuk diketahui sebagai contoh laporan yang kami terima terkait KUR di Provinsi Aceh masih sangat sulit masyarakat untuk mendapatkan KUR walau sudah di verifikasi oleh pendamping KP dan menurut pendamping KP usulan tersebut sudah layak mendapatkan bantuan KUR dari KKP tetapi tidak mendapatkan kejelasan sampai dengan saat ini.
3. Terkait refocusing anggaran KKP 2021 mencapai 1.6 triliun atau mencapai 25% dari total pagu anggaran KKP, kami menilai hal ini mengganggu pertumbuhan pendapatan nelayan, kami Fraksi Gerindra meminta Menteri KKP untuk menjelaskan dengan cermat *progress capaian program*

*strategisnya* terkait pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, petani garam, UMKM dan masyarakat pesisir yang diakibatkan oleh **impact refocusing?**

4. Berdasarkan laporan Realisasi Penyerapan Anggaran KKP Tahun 2021 per 19 Agustus Tahun 2021 bahwa realisasi anggaran rata-rata 56,36 persen. Menurut kami Fraksi Partai Gerindra hal ini capaian biasa karena terjadi refocusing sebanyak 25%, kedepan kami harap program program yang bersifat padat karya masyarakat jangan lagi menjadi korban refocusing di KKP, percepatan penyerapan anggaran perlu di genjot yang signifikan, supaya selaras dengan slogan HUT RI ke-76 yaitu **Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh**
5. Diketahui, KKP mendapatkan alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp 6,122 triliun yang terdiri dari Belanja Operasional sebesar Rp 2,6 triliun dan Belanja Non Operasional Rp 3,5 triliun. Di sisi lain, KKP juga mengusulkan tambahan pagu anggaran sebesar Rp 8,043 triliun. Fraksi Partai Gerindra pada dasarnya mendukung penambahan pagu indikatif KKP yang akan digunakan untuk *meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan, terutama kegiatan-kegiatan strategis yang bersifat padat karya* karena Indonesia dalam kondisi pandemic covid-19 kegiatan-kegiatan yang bersifat **padat karya** sangat membantu peningkatan ekonomi masyarakat nelayan Indonesia, begitu juga mempercepat realisasi anggaran dalam keadaan pandemic yang serba sulit ini.
6. Fraksi Partai Gerindra meminta penjelasan konkrit kepada KKP terutama **Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen Perikanan Budidaya** terkait dampak *refocusing* anggaran terhadap program-program berkaitan dengan bantuan masyarakat, bahkan ada kegiatan kegiatan yang sudah dikeluarkan CPCL seperti kegiatan bioflok, dan kegiatan kegiatan lain ternyata tiba tiba terkena refocusing. Hal ini menyebabkan banyak

konstituen kami yang berprofesi pembudidaya dan nelayan sangat kecewa?

7. Kelebihan tangkapan ikan dipelabuhan selama pandemic covid-19 tidak terdistribusi dengan baik. Kami Fraksi Partai Gerindra meminta KKP untuk secera mencari format penyelesaiannya supaya masyarakat nelayan tidak dirugikan?
8. Seperti kita ketahui, Indonesia mencatatkan nilai ekspor ikan hias mencapai USD 9,2 juta pada kurun waktu Januari-Maret 2021. Capaian ini menjadi yang paling besar dibanding empat tahun terakhir pada periode yang sama. Untuk mendukung hal tersebut, Fraksi Partai Gerindra meminta KKP khususnya Ditjen PB, untuk lebih serius mendorong sektor usaha produksi budidaya ikan hias melalui peningkatan peran penyuluh dalam melakukan pendampingan, pelatihan, bimbingan teknis hingga akses pemasaran kepada pembudidaya guna meningkatkan *income* pembudidaya serta pengembangan budidaya ikan hias.
9. Pada periode Januari-Maret 2021, nilai ekspor produk perikanan Indonesia mencapai 1,27 miliar USD atau naik 14 persen dibanding periode yang sama pada tahun 2020. Namun, pelaku eksportir produk perikanan Indonesia kerap kali menerima penolakan karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan negara tujuan ekspor. Untuk mengantisipasi hal serupa, Fraksi Partai Gerindra meminta KKP melalui Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) untuk terus menjaga dan meningkatkan eksistensi bisnis produksi oleh para pelaku usaha pengolahan ikan dalam menjaga mutu dan keamanan hasil perikanan agar ekspor perikanan kita mampu bersaing dengan produk perikanan negara lain di tengah pandemi Covid-19. Mengingat, jaminan mutu ini penting sebagai upaya meningkatkan kepercayaan pasar dunia terhadap produk perikanan Indonesia.

10. Sejak September 2020 hingga Februari 2021, Otoritas Bea dan Cukai China (GACC) menemukan 10 kasus kontaminasi virus Covid-19 tipe baru pada kemasan dan produk perikanan dari Indonesia yang dikirim delapan perusahaan. Fraksi Partai Gerindra meminta penjelasan detail KKP terkait negara mana saja, dan alasan apa, serta produk perikanan apa saja yang ditolak? Sebab, China merupakan pasar ekspor terbesar Indonesia dari segi volume yang mencapai lebih dari 400.000 ton. Selain AS sebagai negara dengan nilai ekspor kedua produk perikanan kita.
11. Fraksi Partai Gerindra mengingatkan KKP pada usulan DAK tahun 2022 benar-benar dimanfaatkan untuk mendorong program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR). Mengingat, hal ini penting untuk menyerap produksi petambak garam kita dalam memenuhi kebutuhan garam konsumsi dan garam industri dalam negeri. Dikarenakan masih tingginya ketergantungan kita terhadap garam impor. Fraksi Partai Gerindra juga menekankan KKP untuk serius memacu produksi garam rakyat khususnya meningkatkan kadar Natrium Klorida (NaCl) menjadi 94-97 persen sesuai kebutuhan garam rumah tangga dan industri nasional dengan menambah lokasi *washing plant*, terutama di daerah yang memiliki potensi garam.
12. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur pelabuhan ikan di seluruh daerah masih menjadi permasalahan besar. Sebagai contoh dangkalnya beberapa muara pelabuhan ikan khususnya di Provinsi Aceh, yang menyebabkan nelayan sulit untuk melaut. Tetapi dalam RKA/KL KKP tahun 2022 belum terlihat, Fraksi Partai Gerindra meminta Bapak Meteri KKP untuk menjadikan hal tersebut sebagai bagian dari skala prioritas rencana kerja pada satker Ditjen Perikanan Tangkap sebagai upaya menyelesaikan permasalahan tersebut.
13. Fraksi Partai Gerindra prihatin dengan masih maraknya kasus penyelundupan benih benur lobster (BBL) yang kerap menggunakan jalur perairan. Dan diketahui kasus terbaru ribuan Lobster jenis mutiara senilai

Rp11 miliar diamankan oleh aparat Kepolisian unit Ranmor Satreskrim Polrestabes Palembang melalui jalur-jalur baru di sekitar wilayah Palembang. Hal ini menandakan masih lemahnya pengawasan di wilayah perairan Indonesia, kami meminta komitmen KKP untuk terus memperketat pengawasan serta penjagaan di wilayah perairan Indonesia khususnya di setiap pintu atau jalur pelintasan komoditas perikanan dari dan ke Indonesia, disamping meningkatkan pengawasan pada jalur pelabuhan, bandara hingga perbatasan laut.

**Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI;**

**Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan RI, dan seluruh Pejabat Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan RI;**

Demikian tanggapan, catatan, masukan, dan pertanyaan Fraksi Partai Gerindra dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  
Salam Indonesia Raya.*

#### **KOMISI IV FRAKSI PARTAI GERINDRA DPR RI**

G. Budisatrio Djiwandono	- Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
Ir. KRTH. Darori Wonodipuro, M.M., IPU	- Kapoksi
DR. Ir. Hj. Endang S. Thohari, DESS., M.Sc.	- Anggota
Ir. H. TA Khalid, M.M.	- Anggota
DR. H. Azikin Solthan, M.Si.	- Anggota
Hj. Renny Astuti, S.H., S.pN.	- Anggota
Ir. Dwita Ria Gunadi	- Anggota